BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Membicarakan sejarah jalan di pulau jawa tidak bisa dilepaskan dari sejarah Indonesia yang juga terkait dengan bangsa Eropa saat itu yang menduduki Indonesia. Singkatnya, pada tanggal 4 Oktober 1945, Kota bandung dimasuki tantara sekutu yang diikuti oleh serdadu Belanda dan NICA. PU dibawah pimpinan Menteri Muda Perhubungan dan Pekerjaan Umum pada tanggal 20 Oktober telah mengangkat Sumpah Setia Kepada Pemerintah Republik Indonesia. Pada tanggal 24 Nopember 1945, dibagian utara kota, terjadi pertempuran hebat, dan penduduk banyak mengungsi ke kota lain yang di rasa masih aman.

Waktu itu Gedung Sate dipertahankan oleh Gerakan Pemuda PU dan Pasukan Badan Perjuangan yang terdiri kurang lebih 40 orang dengan senjata yang lumayan lengkap. Tanggal 3 Desember 1945, Gedung Sate hanya dipertahankan oleh 21 Orang. Suatu hari pada tanggal 2 desember 1961 Menteri Pertama Ir. Dan tanggal 3 Desember 1945 dikenang sebagai Hari Kebaktian Pekerjaan Umum.

Balai Pengelolaan Jalan Wilayah III ini masuk kedalamnya yang mengurusi berbagai daerah di Jawa Barat seperti Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab.Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab.Subang, Kab.Purwakarta, dan Kab.Karawang.

1. **Visi Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat**

   "Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi"

2. **Misi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dalam Pembangunan jangka menengah 2018-2023:**

   1. Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa Melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat
   2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif.
   3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.
   4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan.
   5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota**.**

2.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah pengaturan formal pekerjaan dalam suatu organisasi. Struktur ini, dapat ditampilkan secara visual dalam bagan organisasi, juga melayani banyak tujuan. ***(Robbins & Coulter 2016 : 322)***.

Berikut adalah struktur organisasi di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah III- Dinas Marga Provinsi Jawa Barat **:**

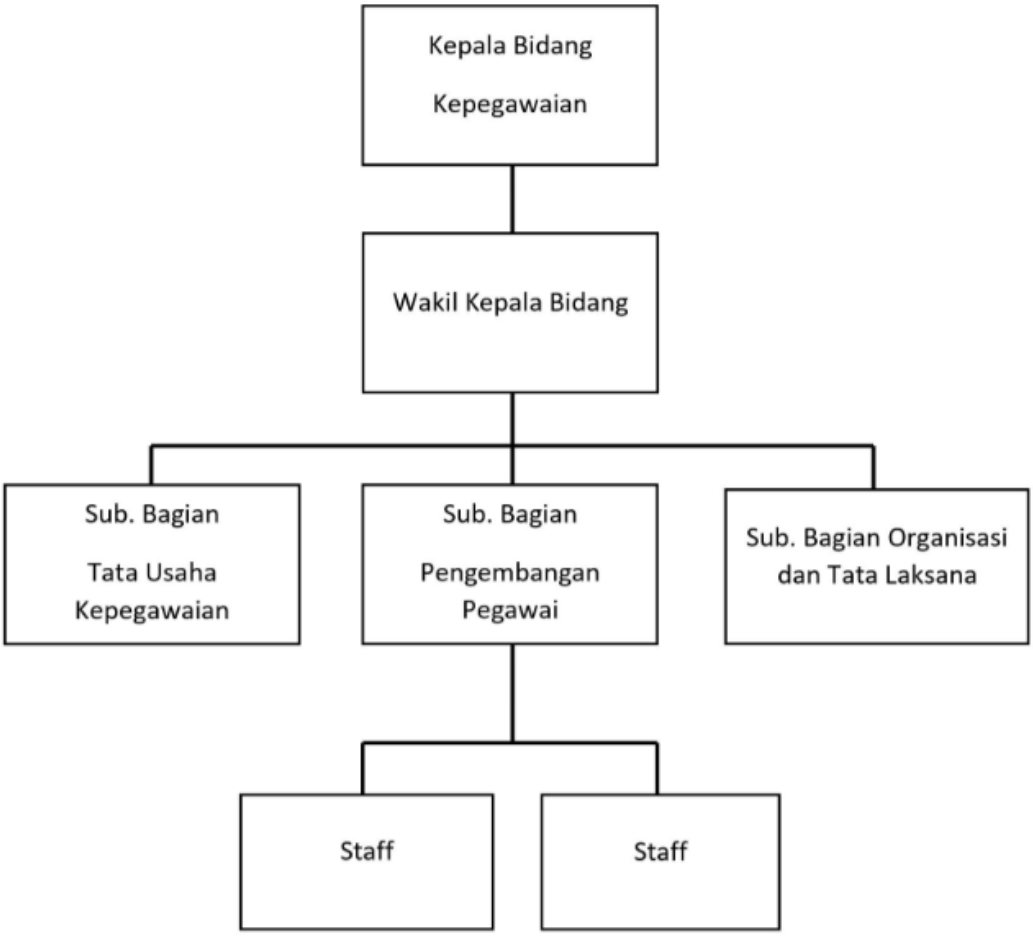

Gambar 2.1

Struktur Organisasi

2.3. Deskripsi Jabatan

1. Kepala Bidang Kepegawaian

Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok di bagian kepegawaian, merencanakan program perencanaan kerja, mengevaluasi pelaksanaan kerja, dan melaporkan hasil kerja ke Dinas.

2. Wakil Kepala Bidang Kepegawaian

Wakil Kepala, memiliki tugas membantu semua yang dilakukan oleh kepala bidang kepegawaian, dan dapat mewakilkan Kepala Bidang, jika sewaktu-waktu tidak dapat hadir dalam rapat rutin.

3. Sub bagian Tata Usaha Kepegawaian

Subbagian Tata Usaha, memiliki tugas membantu Kepala Kepegawaian dalam pengelolaan pengadministrasian surat menyurat, melaksanakan kearsipan biodata pimpinan, dan karyawan di Bina marga.

4. Sub bagian Pengembangan Pegawai

Subbagian Pengembangan Pegawai, memiliki tugas membantu Kepala Kepegawaian dalam menyusun bahan perencanaan program kerja, perencanaan pengembangan karyawan.

5. Sub bagian Organisasi dan Tata Laksana

Subbagian Organisasi dan Tata Laksana memiliki tugas membantu Kepala Kepegawaian dalam menyusun proses surat tugas dan kedinasan, merekap absensi setiap akhir bulan.

6. Staff

Staff, Memiliki tugas membantu seluruh Subbagian yang ada di Kepegawaian, agar dapat segera terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

2.4. Aspek Kegiatan Perusahaan

1. Penyusunan rencana kerja Bidang Bina Marga.
2. Perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pembinaan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan Kabupaten.
3. Perencanaan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten.
4. Pelaksanaan pembangunan dan pengingkatan jalan dan jembatan kabupaten.
5. Pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten.
6. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Bina Marga.